

MODEL POLITIK INFORMASI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI WABAH COVID-19 TAHUN 2020

INDONESIA'S INFORMATION POLITICAL MODEL IN FACING THE COVID-19 PANDEMIC IN 2020

Saleha Mufida¹, Suhirwan², F.G. Cempaka Timur³ (Candara 12)

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(saleha.mufida@idu.ac.id; suhirwan@idu.ac.id; fg.cempaka@idu.ac.id)

Abstrak (Bahasa Indonesia) –Sejak pertama kali COVID-19 ditemukan di Indonesia, banyak tersebar informasi palsu dan konspirasi terkait COVID-19 yang menyebabkan masyarakat tidak percaya dan enggan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini menyebabkan penanganan wabah COVID-19 membutuhkan politik informasi. Permasalahan penelitian ini adalah model politik informasi yang sesuai diterapkan di Indonesia dalam menghadapi Wabah COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model politik informasi di Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah model politik informasi bidang kesehatan Pemerintah Indonesia adalah model politik informasi federalisme yang dilakukan melalui negosiasi dan konsensus, sehingga menghasilkan pemahaman yang sama terhadap informasi, akses terhadap informasi penting, informasi yang berkualitas, serta efisiensi dalam tata kelola informasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penanganan wabah COVID-19 di Indonesia membutuhkan politik informasi dan model yang sesuai diterapkan di Indonesia adalah model politik informasi federalisme.

Kata Kunci: Politik Informasi, COVID-19, dan Indonesia.

Abstract (English) – Since the first time COVID-19 was discovered in Indonesia, many false information and conspiracies related to COVID-19 have spread, causing people to distrust and reluctant to apply health protocols. This causes handling the COVID-19 outbreak to require information politics. The problem of this research is the political information model that is suitable to be applied in Indonesia in dealing with the COVID-19 outbreak. The purpose of this study is to determine the political model of information in Indonesia in dealing with the COVID-19 outbreak. This research uses qualitative methods, namely data obtained from interviews and documentation studies. The result of this research is that the information politics model in the health sector of the Government of Indonesia is a political model of information on federalism conducted through negotiation and consensus, resulting in the same understanding of information, access to important information, quality information, and efficiency in information management. The conclusion of this study is that handling the COVID-19 outbreak in Indonesia requires information politics and the appropriate model applied in Indonesia is the information politics model of federalism.

Keywords: Information Politics, COVID-19, and Indonesia

Pendahuluan

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, ancaman wabah penyakit dikategorikan sebagai ancaman nyata yang bersifat nonmiliter (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, p. 22). Jika dilihat dari sudut pandang peperangan asimetris, wabah penyakit yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan di bidang kesehatan saja. Peristiwa wabah penyakit di suatu wilayah dapat mengandung persoalan yang lebih kompleks, misalnya wabah penyakit secara sengaja diciptakan untuk menghabiskan suatu kelompok ras tertentu, wabah penyakit dapat direayasa untuk tujuan ekonomi seperti perdagangan vaksin, serta wabah penyakit yang lebih luas seperti Pandemi COVID-19 bisa jadi merupakan serangan senjata biologis yang sengaja dibuat oleh aktor tertentu untuk menciptakan kekacauan global dalam rangka mengubah tatanan yang ada menjadi tatanan dunia baru (Sudarto, 2020).

Dinamika ancaman terhadap pertahanan negara berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Ancaman perang konvensional atau agresi militer antara dua aktor negara semakin mustahil terjadi, namun ancaman-ancaman lain hadir dengan kecenderungan yang bersifat asimetris, seperti ancaman terorisme, insurjensi, serangan siber, serangan senjata biologis, kimia, nuklir, serta wabah penyakit yang dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal.

Pada perang konvensional yang bersifat simetris, semua pihak dapat mengetahui secara pasti siapa aktor yang saling berhadapan dalam peperangan. Sementara dalam perang asimetris, tidak diketahui secara nyata aktor yang terlibat perang, siapa melawan siapa, apa melawan apa, serta tidak ada wujud perangnya secara konkret (Kompas.com, 2008).

Indonesia pernah mengalami serangan asimetris di sektor kesehatan pada awal tahun 2000, yaitu kasus yang terkait dengan *The Naval Army Medical Research Unit 2* (NAMRU-2). NAMRU-2 merupakan Unit 2 Penelitian Medis Angkatan Laut Amerika Serikat yang hakikatnya merupakan markas operasi intelijen yang mengatasnamakan

penelitian tentang penyakit tropis di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan era Presiden SBY yang mengungkapkan sejumlah keanehan dari proyek NAMRU-2, sehingga dia berhasil memutus kerjasama Indonesia dengan NAMRU-2 pada 16 Oktober 2009. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda juga menyadari keganjilan dari proyek tersebut karena sejak tahun 2000 NAMRU-2 tidak pernah melaporkan hasil penelitiannya serta tidak berkontribusi dalam penanganan demam berdarah dan flu burung di Indonesia (Pranoto & Hendrajit, 2016, p. 101).

Sejak terjadi wabah COVID-19, lalu lintas pada domain informasi tentu meningkat karena kebutuhan informasi dan pelaksanaan kegiatan bekerja dan belajar jarak jauh. Domain informasi dapat menjadi lahan basah bagi oknum pencari keuntungan, sehingga dalam hal ini bukan hanya penanganan wabah saja yang penting, melainkan pengendalian informasi juga diperlukan dalam menghadapi wabah penyakit.

Penanganan wabah penyakit berkaitan erat dengan aspek informasi. Berdasarkan prinsip epidemiologi, penanganan wabah dilakukan dengan pengawasan kesehatan masyarakat atau

public health surveillance. Dalam 21st *World Health Assembly* (1968), surveilans diartikan sebagai pengumpulan dan penggunaan informasi epidemiologi secara sistematis untuk perencanaan, implementasi, dan penilaian pengendalian penyakit). Istilah lain dari surveilans antara lain survei, statistik kesehatan, dan sistem informasi kesehatan (U.S. Department of Health and Human Resources, *Principles of Epidemiology in Public Health Practice*, 2006, pp. 5-2).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penanganan wabah penyakit tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang medis saja, melainkan perlu dilihat dari aspek-aspek lain, seperti pertahanan, ekonomi, diplomasi, penegakan hukum, maupun informasi. Dalam doktrin pertahanan AS, instrumen kekuatan nasional meliputi diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi (DIME). Informasi menjadi salah satu aspek yang termasuk dalam instrumen kekuatan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi memiliki peran yang sangat besar dalam pertahanan negara, termasuk pertahanan dari wabah penyakit.

Informasi dan komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan teori komunikasi dari Harold Lasswell, yaitu *“who says what in which channel to whom with what effects”*, tindakan komunikasi memiliki setidaknya lima komponen yaitu siapa yang menyampaikan informasi, apa informasi yang disampaikan, media apa yang digunakan, kepada siapa informasi tersebut disampaikan dan apa efek yang ditimbulkan dari informasi tersebut (Lasswell, 1948, p. 117). Adapun politik informasi diartikan sebagai pengaruh yang luas dari pemerintah atau penguasa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam proses, tindakan dan perilaku yang berkaitan dengan informasi.

Dalam hal ini, politik informasi menjadi wewenang pemerintah untuk menyampaikan pesan terkait COVID-19 kepada masyarakat dengan menggunakan media konvensional maupun media internet sebagai upaya mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat yang dapat mendukung upaya penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Dengan kata lain, politik informasi ini dapat menjadi kebijakan strategis yang dilaksanakan pemerintah untuk mempertahankan negara dari wabah penyakit COVID-19 di Indonesia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyatakan bahwa dari hasil survei terkait kepatuhan penggunaan masker menunjukkan bahwa 50% masyarakat Indonesia belum mematuhi protokol kesehatan. Padahal 90% masyarakat memahami arti penting protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 (Fathurrohman, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa politik informasi bidang kesehatan di Indonesia belum berdampak besar dalam mengendalikan wabah penyakit. Latar belakang masalah tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji model politik informasi di Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19 Tahun 2020.

Inti permasalahannya adalah mengelola ruang informasi untuk mengubah perilaku masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan model politik informasi yang sesuai dalam menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014, p. 4).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi dokumen (Creswell, 2014, p. 190). Adapun pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data (Lexy J. Moleong, 2016, p. 330).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran Hoaks Akibat Rendahnya Literasi Digital Masyarakat Indonesia

Hoaks atau berita palsu diartikan sebagai informasi yang tersebar melalui media, seringkali untuk mengambil keuntungan pada aktor sosial yang spesifik, yang terbukti mengandung materi yang tidak benar. (Sabrina, 2019). Berita palsu yang tersebar di media sosial menjadi lebih masif ketika diambil oleh situs atau akun yang terkemuka dan memiliki banyak pengikut. Dalam era kebebasan berpendapat, hoaks ditengarai menjadi cara untuk melakukan propaganda (Yates, 2016). Berdasarkan data dari Kominfo, hoaks yang paling banyak meramaikan media sosial di Indonesia adalah berkaitan dengan isu politik. Misalnya menjelang hari Pemilihan

Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019, produksi berita bohong atau hoaks meningkat drastis. Selain hoaks yang memuat isu politik, banyak juga tersebar hoaks yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), kesehatan, bencana alam, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya (Fitriani, 2019).

Penyebaran hoaks atau berita bohong yang masif di Indonesia erat kaitannya dengan literasi digital masyarakat yang masih relatif rendah. Menurut Kepala Editor Trans Media Titin Rosmasari, rendahnya budaya literasi Indonesia menjadi salah satu faktor masyarakat Indonesia mempercayai hoax atau berita palsu (Tirto.id, 2017). Berdasarkan penelitian UNESCO tahun 2016 pada 61 negara di dunia menunjukkan bahwa kebiasaan membaca di Indonesia tergolong sangat rendah yaitu berada pada peringkat ke-60 (Kompas.com, 2019). Peningkatan jumlah pengguna gawai atau *gadget* yang tidak dibarengi dengan peningkatan literasi menyebabkan berita palsu semakin diminati dan dipercayai masyarakat.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, pemerintah telah memiliki

sejumlah lembaga dan kementerian yang semakin ditingkatkan fungsinya untuk memantau publikasi informasi yang akan menjadi konsumsi masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah ini bukan hanya mengamankan informasi di ruang publik saja, melainkan juga mengamankan infrastruktur kritis nasional bidang informasi yang dapat menjadi sasaran serangan siber. Lembaga dan Kementerian yang memiliki fungsi dalam mengelola ruang informasi publik diantaranya adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi, Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Cybercrime Kepolisian Republik Indonesia, dsb.

Untuk melawan berita palsu, pemerintah juga telah membentuk perangkat aturan undang-undang yang diharapkan dapat memberikan efek jera pada oknum-oknum penyebar berita palsu serta dapat mendidik masyarakat secara umum untuk lebih bijaksana dalam menggunakan ruang publik. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Pemerintah juga memberdayakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk

memerangi hoaks, misalnya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Dengan adanya keterkaitan antara literasi digital masyarakat dengan penyebaran hoaks pada masa pandemi, maka literasi masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat mendukung upaya penanganan wabah.

Peningkatan Berita Palsu pada Masa Pandemi

Keterbukaan ruang informasi publik pada saat terjadi wabah penyakit tidak bisa dilepaskan dari penyebaran informasi palsu. Salah satu contoh adalah Epidemii Ebola di Republik Demokratik Kongo. Tugas besar petugas kesehatan Kongo dalam penanganan wabah adalah memerangi informasi yang salah, khususnya yang tersebar di media sosial. Masyarakat Kongo banyak yang membicarakan Ebola dalam jaringan pesan Whatsapp. Informasi yang menyebar itu cenderung tidak terawasi dan sulit untuk memeriksa sumbernya karena sudah terjadi rantai penyebaran yang panjang (Martin, 2019).

Salah satu rumor terkait Ebola yang menyebar di Kongo, misalnya virus Ebola dapat disembukan dengan meminum Nescafe yang dicampur dengan coklat dan gula atau dengan dua bawang Bombay. (Hogan, 2014).

Informasi palsu yang lain yang tersebar yaitu *“the Ebola outbreak won’t be over until the population rises up against the response team... Doctors are killing people; Ebola is a business; the virus is made to eliminate the Congolese; there are fake tablets that kill”*.

Thoung Nguyen, seorang Koordinator Manajemen Informasi the Red Cross berinisiatif untuk melakukan proyek pemetaan rumor pada Agustus 2018. Nguyen menekankan bahwa mayoritas orang percaya bahwa Ebola itu nyata, namun dia dan timnya telah mendeteksi sebanyak 33.016 rumor di 17 zona kesehatan di Kongo. Terdapat hanya 8 persen dari masyarakat yang menyangkal dan menganggap bahwa Ebola tidak ada. Namun, terdapat sejumlah versi penyangkalan yang lebih konspirasional. Tujuh persen rumor menyebutkan teori supranatural yang berkaitan dengan sihir (Martin, 2019).

Proporsi rumor yang lebih besar cenderung menyalahkan profesional kesehatan. Terdapat 21 persen rumor menyatakan bahwa Ebola digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat demi mendapatkan pengaruh atau uang, 13 persen mengungkapkan ketidakpercayaan pada layanan medis, dan empat persen secara eksplisit berpendapat bahwa

Ebola direkayasa oleh orang asing dengan niat membunuh atau untuk tindak kejahatan lainnya (Martin, 2019).

Selain terjadi penyebaran informasi palsu pada masa wabah Ebola, konspirasi dan berita palsu juga terjadi pada wabah Zika. Sebuah konspirasi Zika telah menyebabkan sepertiga penduduk Amerika percaya bahwa penyebaran penyakit Zika disebabkan oleh nyamuk hasil rekayasa genetika. Data ini diperoleh dari sebuah survei yang dilakukan oleh *the University of Pennsylvania’s Annenberg Public Policy Center*. Mitos atau rumor ini bermula dari sebuah cuitan seseorang bernama Reddit yang kemudian diulangi atau re-tweet menyatakan bahwa Oxitec, sebuah perusahaan Inggris memodifikasi nyamuk untuk melawan penyebaran penyakit lain, demam berdarah, dan mungkin menjadi akar masalah dari epidemi ini. Reddit juga menyatakan dalam postingannya bahwa terdapat kasus mikrocefali yang terjadi tidak jauh dari Juazeiro, Brazil yaitu tempat Oxitec memperkenalkan nyamuk modifikasi pada tahun 2012 (Specter, 2016).

Para peneliti dari *George Washington University*, *Johns Hopkins University*, dan *University of Georgia* di Amerika Serikat menyarankan otoritas

kesehatan untuk melakukan pemantauan di media sosial. Tim pemantau Twitter mengidentifikasi hampir 140.000 tweet antara 1 Januari hingga 29 April 2016 yang berisi kata kunci “vaksin” dan “zika”. Mereka mengamati sejumlah teori konspirasi atau klaim *pseudoscientific* mempertanyakan mengapa pemerintah menginginkan vaksin. Salah satu klaim *pseudoscientific* adalah bahwa mikrosefali disebabkan oleh vaksin MMR (Measles Mumps Rubella) dan perusahaan farmasi menyalahgunakan virus Zika untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan vaksin Zika (Dredze et al., 2016).

Pandemi COVID-19 juga tidak bisa dilepaskan dari hoaks dan konspirasi. Menurut keterangan dari Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, terdapat 1.222 berita bohong selama periode Februari 2020 hingga April 2020 (Pikiran-rakyat.com, 2020). Dari pemberitaan Kompas.com pada 5 Agustus 2020, Kemkominfo mendeteksi 1.016 isu hoaks yang terkait COVID-19 dan tersebar di 1.912 platform. Sementara berdasarkan catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), sejak akhir Januari-September 2020, terdapat sekitar 600

hoaks terkait COVID-19 yang telah mereka klarifikasi dan 20 persen di antaranya merupakan hoaks seputar isu pencegahan dan pengobatan COVID-19. Menurut Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, masyarakat Indonesia memang cenderung mudah percaya dengan narasi-narasi yang berbasis testimoni. Mafindo juga mencatat bahwa hoaks yang marak tersebar adalah terkait vaksin COVID-19. Narasi yang dibangun adalah vaksin dapat memicu bahaya dan dapat memperparah serangan terhadap orang penderita demam berdarah dengue (DBD) (Kompas.com, 2020).

Selain hoaks, teori konspirasi terkait COVID-19 juga banyak tersebar di ruang publik. Sejumlah teori yang paling banyak diterima masyarakat yaitu terkait kebocoran laboratorium biologi di China, pengembangan senjata biologis, target penanaman cip di dalam tubuh, dan lain-lain. Tidak sedikit masyarakat yang percaya karena berbagai video serta narasi yang dibuat sangat menarik perhatian masyarakat. Para selebritis atau figur publik sangat berpengaruh besar dalam menyebarkan teori konspirasi yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Merebaknya hoaks dan teori konspirasi mengakibatkan masyarakat tidak

percaya dengan kebenaran COVID-19, sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan (Kompas.com, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoaks dan konspirasi pada masa pandemi berpengaruh pada penanganan COVID-19 dan upaya untuk memutus rantai penyebarannya. Oleh karena itu hoaks dan konspirasi harus diperangi dengan informasi yang kredibel.

Pola Koordinasi Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Dalam Mengelola Data Dan Informasi Terkait Wabah Penyakit

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai model politik informasi di Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan menemukan pola koordinasi kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengelola data dan informasi terkait wabah penyakit. Penelitian ini secara khusus melihat pengelolaan data dan informasi dalam masa pandemi COVID-19.

Dalam penanganan COVID-19, kementerian dan lembaga terkait berkoordinasi sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (KPC-PEN) secara rutin mengadakan rapat koordinasi mingguan. Rapat ini dilakukan melalui platform *Zoom Meeting* yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai satuan, diantaranya Satgas Pusat, Satgas Daerah, Kepala Daerah, Kepala Kodim, Kepala Polres dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan topik rapat.

Setelah berkoordinasi dan menghasilkan kebijakan, selanjutnya pemerintah perlu menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat. Dalam menyampaikan informasi bidang kesehatan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian/lembaga dari pusat hingga daerah agar informasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Secara khusus dalam penanganan COVID-19, pemerintah berupaya melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh agama dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan dan pengendalian wabah penyakit.

Secara garis besar, model politik informasi bidang kesehatan di Indonesia dalam menghadapi wabah penyakit, dapat dipahami dari pola koordinasi

Kementerian dan Lembaga dalam pengelolaan data dan informasi COVID-19. Pola tersebut dimulai dari Kemenkes yang mengumpulkan data dari Dinas Kesehatan Daerah, lalu data tersebut diolah menjadi informasi yang mudah disampaikan. Informasi/narasi dari Kemenkes dibagi ke Kominfo untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Selanjutnya Kominfo mengajak kementerian/lembaga lainnya untuk berkontribusi menyebarkan informasi. Informasi yang sama didistribusikan ke Pemerintah Daerah kembali agar informasi sampai ke masyarakat dengan baik melalui berbagai strategi komunikasi publik.

Model Politik Informasi di Indonesia dalam Menghadapi COVID-19

Menurut Paul A. Strassman dalam *Irreverent Dictionary of Information Politics* (1995), politik informasi mencakup tujuan, kebijakan, praktik, dan gagasan organisasi tentang bagaimana memperkuat keputusan lokal ketika seluruh perusahaan bekerja sama untuk keunggulan informasi. Artinya politik informasi dalam tatanan negara adalah berkaitan dengan kebijakan negara untuk memperkuat keputusan yang sudah diambil dalam menghadapi

ancaman yang ingin mengacaukan melalui medium informasi. Menurut Davenport (1992), informasi merupakan sumber daya yang sangat krusial dalam mendukung segala aspek kehidupan, sehingga politik informasi diperlukan.

Davenport merumuskan lima model politik informasi, meliputi *technocratic utopianism*, *anarchy*, dan *feudalism* yang cenderung tidak efektif, serta *monarchy* dan *federalism* yang cenderung lebih efektif jika diterapkan. Berdasarkan keterangan dari sejumlah informan, peneliti dapat mengidentifikasi bahwasannya model politik informasi bidang kesehatan di Indonesia adalah model politik informasi federalisme. Secara definisi, model politik informasi federalisme adalah pendekatan manajemen informasi berdasarkan konsensus dan negosiasi pada elemen informasi utama organisasi dan struktur pelaporan.



Gambar 4.1 Model Politik Informasi Federalisme dalam Menghadapi COVID-

19

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Dalam konteks negara, model politik informasi federalisme adalah ketika penguasa melakukan pengendalian informasi bersama dengan lembaga-lembaga terkait melalui negosiasi dan konsensus dengan struktur pelaporan yang jelas. Pengendalian informasi sejenis itu adalah pengendalian informasi yang diterapkan di Indonesia. Peneliti melihatnya dari pengambilan kebijakan terkait penanganan wabah yang tidak berada pada satu tangan penguasa, melibatkan Kementerian/Lembaga lain serta para tokoh/ahli terkait, dilakukan secara koordinatif dan sinergis. Menurut peneliti model politik informasi federalisme sesuai untuk diterapkan di Indonesia yang menggunakan sistem politik demokrasi dan model ini dapat lebih efektif untuk mendukung penanganan wabah.

Peneliti melihat pengendalian informasi yang tertutup dapat memperburuk kondisi karena masyarakat tidak memahami fakta sebenarnya tentang dampak dari wabah penyakit tersebut, sehingga mereka cenderung bersikap abai. Peneliti melengkapi penelitian dari Christensen dan Painter yang meneliti penanganan SARS di China, Hong Kong, dan Kanada.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, model politik informasi yang tertutup di China menunjukkan penanganan wabah lebih buruk dibandingkan dua negara lainnya yang lebih terbuka. Peneliti juga memperkuat penelitian dari Kavanagh yang menemukan fakta bahwa politik informasi di China telah menyebabkan respons yang lambat terhadap wabah COVID-19.

Model politik informasi di Indonesia dapat dikatakan terbuka karena pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk menyampaikan informasi yang terstruktur dan terbuka. Informasi perkembangan kasus di Indonesia dapat menjadi contoh bahwa pemerintah melakukan konsensus dan struktur pelaporan yang jelas. Kementerian Kesehatan mengumpulkan data di lapangan dari Dinas Kesehatan Daerah. Selanjutnya data tersebut diolah oleh Satgas COVID-19 menjadi infografik yang mudah dibaca oleh masyarakat. Data yang sudah diolah akan dibagikan kepada Pemerintah Daerah, media konvensional, serta instansi lainnya yang memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Untuk memahami politik informasi bidang kesehatan di Indonesia, penulis menganalisis menggunakan empat dimensi model politik informasi dari Davenport, yaitu: Kesamaan penggunaan kosakata dan makna; Wewenang mengakses informasi penting; Kualitas informasi yaitu memiliki ciri integritas, akurat, terkini (*currency*), dapat ditafsirkan, dan bernilai; Efisiensi dalam tata kelola informasi.

- a. Kesamaan penggunaan kosakata dan makna. Berkaitan dengan kesamaan penggunaan kosakata dan makna, sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa pemerintah mengeluarkan sebuah narasi tunggal yang sudah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga terkait dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat secara serentak dan berkelanjutan melalui berbagai media.
- b. Wewenang mengakses informasi penting. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan strategi peta heliks, berkolaborasi dengan media dan wartawan, mengaktivasi perangkat kesehatan daerah, menggunakan pendekatan modern hingga konvensional agar seluruh informasi penting dapat diakses oleh

masyarakat sampai pada mereka yang berada di wilayah terpencil.

- c. Kualitas informasi yaitu memiliki ciri integritas, akurat, terkini, dapat ditafsirkan, dan bernilai. Dalam hal ini, peneliti melihat banyak kekurangan, meskipun pemerintah sudah dalam upaya. Dalam beberapa kasus, informasi yang sampai kepada masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang berada di lapangan. Misalnya, berkaitan dengan akurasi jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemampuan negara yang belum maksimal dalam melakukan tes spesimen secara menyeluruh menyebabkan data jumlah kasus positif yang dipublikasi belum menggambarkan kondisi sebenarnya secara nasional.

Ketika kita melihat jumlah kasus positif COVID di Indonesia dan Amerika Serikat, Indonesia relatif jauh lebih kecil dari kasus positif di Amerika Serikat yang berada di posisi teratas. Akurasi data dari pemerintah Indonesia tidak bisa disamakan dengan AS karena kemampuan pemeriksaan spesimen di antara kedua negara ini berbeda. Data jumlah kasus positif di AS mungkin lebih menggambarkan

kondisi sebenarnya, ketimbang data jumlah kasus positif di Indonesia.

d. Efisiensi dalam tata kelola informasi.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia masih memiliki tantangan yang besar karena berbagai hoaks dan informasi palsu yang beredar di masyarakat sangat gencar, sehingga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan wabah. Namun, dalam penerapan politik informasi yang federalis, karakternya adalah keterbukaan informasi sehingga disinformasi tidak dapat dibendung sepenuhnya.

Tata kelola informasi yang tidak efisien dapat dilihat bahwa pada beberapa kesempatan, pemerintah menyampaikan informasi yang kontradiktif. Misalnya berkaitan dengan vaksinasi, pemerintah pada awalnya mengatakan bahwa hanya sebagian masyarakat yang akan mendapatkan vaksin gratis. Selanjutnya pemerintah meralat informasi bahwa semua masyarakat akan divaksinasi secara gratis. Berkaitan dengan proses uji klinis vaksin juga tidak sampai pada masyarakat, namun pemerintah

sudah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal.

Dari penjelasan tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa model politik informasi bidang kesehatan Indonesia adalah model politik federalisme yang dapat dilihat dari sistem informasi yang terbuka serta proses pengambilan kebijakan yang melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas dan kebijakan yang memadai.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Model politik informasi bidang kesehatan di Indonesia adalah model politik informasi federalisme. Dalam konteks negara, model politik informasi federalisme adalah ketika penguasa melakukan pengendalian informasi bersama dengan lembaga-lembaga terkait secara konsensus dengan struktur pelaporan yang jelas. Pengendalian informasi sejenis itu adalah sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam penanganan wabah. Peneliti melihatnya dari pengambilan kebijakan terkait penanganan wabah yang tidak berada pada satu tangan penguasa, melibatkan Kementerian/Lembaga lain

serta para tokoh/ahli terkait, dilakukan secara koordinatif dan sinergis.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Ed.* Los Angeles: SAGE Publications.
- Davenport, T. H., Prusak, L., & Eccles, R. (1992). Information Politics. *Sloan Management Review*, 53-65.
- Dredze, M., Broniatowski, D. A., & Hilyard, K. M. (2016). Zika vaccine misconceptions: A social media analysis. *Elsevier*, 34(Vaccine), 3441-3442.
- Fadila, R. U. (2020). *Selama Pandemi COVID-19, Jumlah Kasus Hoaks Alami Peningkatan.* Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01377073/selama-pandemi-COVID-19-jumlah-kasus-hoaks-alami-peningkatan>, diakses pada 17 Juni 2020.
- Fitriani, F. F. (2019). *Kominfo Catat Berita Hoaks Naik, Paling Banyak Soal Politik.* Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20190409/15/909834/kominfo-catat-berita-hoaks-naik-paling-banyak-soal-politik->, diakses pada 21 Juli 2020.
- Halim, D. (2020). *6 Bulan Pandemi COVID-19: Hoaks dan Teori Konspirasi yang Memperparah Penanganan...* Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/09090921/6-bulan-pandemi-COVID-19-hoaks-dan-teori-konspirasi-yang-memperparah?page=all>, diakses pada 27 September 2020.
- Hogan, C. (2014). 'There is no such thing as Ebola.' *The Washington Post.* Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/07/18/there-is-no-such-thing-as-ebola/>, diakses pada 6 Juni 2020.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia.* Jakarta.
- Kompas.com. (2008, Juli 10). *Perang Asimetris, Bentuk Perang Baru.* Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2008/07/10/21091857/perang.asimetris.bentuk.perang.baru>, diakses pada 26 Oktober 2020.
- Pranoto, M. A., & Hendrajit. (2016). *Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru.* Jakarta: Global Future Institute.
- Purnamasari, D. M. (2020). *Anggota Satgas: Survei BPS, 17 Persen Masyarakat Indonesia Tak Percaya COVID-19.* Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/16414751/anggota-satgas-survei-bps-17-persen-masyarakat-indonesia-tak-percaya-COVID?page=all>, diakses pada 20 November 2020.
- U.S. Department of Health and Human Resources. (2006). *Principles of Epidemiology in Public Health Practice.* Atlanta: Centers for Disease Control Prevention (CDC).
- Lasswell, H. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas.* New York: Institute for Religious and Social Studies.

- Martin, A. (2019). *Ebola is killing people but rumours about Ebola are killing even more*. Independent. Retrieved from <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/fake-news-ebola-outbreak-drc-red-cross-a8956816.html>, diakses pada 11 Juni 2020.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridhoi, M. A. (2020). *Anies dan Pemerintah Pusat Selisih Tangani Corona, Dampaknya ke Publik*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5eba5f3e7b54f/anies-dan-pemerintah-pusat-selisih-tangani-corona-dampaknya-ke-publik>, diakses pada 27 September 2020.
- Sabrina, A. R. (2019). Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. *Communicare*, 5(Journal of Communication Studies), 31–46.
- Specter, M. (2016). *The Dangerous Conspiracy Theories About the Zika Virus*. The New Yorker. Retrieved from <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-dangerous-conspiracy-theories-about-the-zika-virus>, diakses pada 15 Juni 2020.
- Sudarto. (2020). *COVID-19 Indikasikan Potensi Perang Biologis*. Retrieved from <https://theglobal-review.com/COVID-19-indikasikan-potensi-perang-biologis/>, diakses pada 26 Oktober 2020.
- Yates, S. (2016). *'Fake News'– Why People Believe It and What Can Be Done to Counter It*. Retrieved from <https://ethicaljournalismnetwork.org/fake-news-peoplebelieve-can-done-counter>, diakses pada 15 Desember 2020.